

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) telah merambah ke segala aspek kehidupan, termasuk sistem pemerintahan. Dalam merespon hal tersebut. Dalam merespon hal tersebut, pada tahun 2018 Presiden Republik Indonesia saat itu, Joko Widodo, mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang digunakan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel, serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya. Perpres ini juga mendorong penggunaan TIK dalam berbagai aspek pemerintahan, termasuk dalam pengelolaan arsip dinamis. Oleh sebab itu, untuk mendukung pengimplementasian perpres tersebut dalam bidang pengelolaan arsip dinamis maka Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara mengeluarkan sebuah keputusan yang melandasi lahirnya sebuah sistem informasi untuk pengelolaan arsip dinamis dalam wujud Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Indonesia Nomor 679 Tahun 2020 tentang Aplikasi Umum Bidang Kearsipan Dinamis. Setahun kemudian, Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) selaku lembaga pemerintah setingkat kementerian dan selaku pembina kearsipan untuk wilayah Indonesia mengeluarkan Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Penerapan Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (SRIKANDI). Aplikasi SRIKANDI ditetapkan sebagai sistem kearsipan nasional yang menggantikan Sistem Informasi Kearsipan Dinamis (SIKD). Namun dalam implementasinya, SRIKANDI masih berfokus pada pengelolaan arsip surat masuk dan surat keluar, sementara jenis arsip lain belum memiliki fitur pengelolaan khusus. Kondisi ini menyebabkan beberapa instansi, termasuk Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi

Jawa Tengah, menghadapi kendala dalam mengelola arsip kegiatan secara sistematis dan terintegrasi.

Bappeda Provinsi Jawa Tengah sebagai instansi pemerintah mengelola berbagai jenis arsip. Arsip aktif digunakan langsung untuk kegiatan operasional, sedangkan arsip inaktif informasinya dibutuhkan untuk digunakan sebagai referensi dalam rangka penyusunan kegiatan organisasi (Permadani & Waluyo, 2021). Selain itu, terdapat arsip vital sebagai syarat utama kegiatan operasional, karena sifatnya yang tidak dapat diperbarui (Herawan, 2019). Disisi lain, arsip foto digunakan sebagai dokumentasi visual dari berbagai kegiatan (Rakhmawati et al., 2020).

Berdasarkan media simpannya, arsip yang dikelola oleh Bappeda terdiri dari arsip konvensional berbasis tekstual dan elektronik. Arsip tekstual merujuk pada arsip dalam bentuk tulisan yang tertuang dalam media fisik seperti kertas (Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Yogyakarta, 2022), sedangkan arsip elektronik mencakup dokumen digital atau hasil alih media, yang kemudian dikelola ke dalam sistem kearsipan. Melihat perbedaan antara keduanya, penting untuk memperhatikan metode penyimpanan arsip agar lebih aman dan terstruktur. Arsip tekstual cenderung membutuhkan media atau ruang penyimpanan fisik dan prosedur manual dalam penataan serta temu kembali arsip (Susanti & Puspasari, 2020), sementara arsip elektronik menuntut keberadaan teknologi informasi dengan menggunakan perangkat lunak sebagai media penyimpanan dan perangkat keras sebagai sistem pengelola data (Nusantara, 2018). Oleh karena itu, Bappeda sebagai instansi yang membuat dan mengelola arsip wajib untuk menjaga keutuhan dan keamanan informasi yang tersimpan, sekaligus menjamin kemudahan diakses dan terlindungi dari risiko gangguan maupun penyalahgunaan data.

Arsip foto adalah salah satu jenis arsip dalam dokumentasi visual yang tidak hanya berupa gambar saja, tetapi merupakan rekaman kegiatan. Sebagai media dokumentasi visual, arsip foto mempunyai peranan penting dalam menyampaikan informasi secara faktual. Selain itu, arsip foto dapat berfungsi sebagai bukti autentik organisasi yang bernilai historis sekaligus sebagai sarana pelestarian jangka panjang. Arsip foto diciptakan melalui kegiatan visualisasi melalui proses fotografi

dan memerlukan pengelolaan yang sistematis agar nilai gunanya tetap terjaga (Saputro & Fitri, 2021).

Pengelolaan arsip di Bappeda Provinsi Jawa Tengah, disesuaikan dengan jenis dan fungsinya. Pengelolaan arsip aktif saat ini sudah dikelola dengan menggunakan SRIKANDI yang berfungsi sebagai sistem informasi kearsipan dinamis terintegrasi secara nasional. Sementara itu, arsip yang pengelolaannya belum bisa diakomodir dengan menggunakan SRIKANDI juga tidak bisa menggunakan Sistem Informasi Kearsipan Dinamis (SIKD), kecuali arsip inaktif dalam bentuk tekstual. Hal ini menunjukkan bahwa masih terdapat transisi dalam sistem pengelolaan arsip elektronik. Namun, beberapa fitur penyimpanan arsip di SIKD sudah dihapus, termasuk fitur untuk mengelola arsip foto elektronik.

Berdasarkan data Unit Kearsipan Bappeda Provinsi Jawa Tengah tahun 2025, jumlah arsip foto elektronik yang tersimpan mencapai lebih dari 1.000 file arsip foto elektronik yang terdokumentasi sejak tahun 1971 hingga 1990. Arsip foto tersebut mencakup dokumentasi kegiatan rapat koordinasi, kunjungan kerja, pelatihan, hingga kegiatan perencanaan pembangunan daerah. Sejak tahun 2021, setelah fitur arsip foto di aplikasi SIKD dihapus karena penyesuaian anggaran dan fokus pengembangan pada surat dinamis, Bappeda tidak lagi memiliki sistem resmi untuk menyimpan arsip foto elektronik.

Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan sistem antara kebutuhan pengelolaan arsip foto elektronik dengan kemampuan sistem kearsipan resmi pemerintah. Akibatnya, Bappeda Provinsi Jawa Tengah mengalami keterbatasan dalam mengelola arsip foto, sehingga memanfaatkan Google Drive sebagai sarana penyimpanan arsip foto elektronik sementara. Pemanfaatan Google Drive dilatarbelakangi oleh belum tersedianya sistem resmi yang dirancang untuk mendukung pengelolaan arsip foto secara digital. Dalam kondisi tersebut, Google Drive digunakan sebagai alternatif media penyimpanan sekaligus sarana pencadangan data untuk meminimalisasi risiko kehilangan arsip akibat penghapusan fitur arsip foto pada sistem SIKD yang sebelumnya digunakan. Pada konteks ini, penghapusan fitur juga berakibat pada hilangnya data arsip foto elektronik sebelumnya termasuk daftar arsip foto elektronik yang berisi detail

informasi arsip di dalamnya. Pemilihan layanan ini didasari karena ruang penyimpanan yang fleksibel, kemudahan akses, dan pengamanan dokumen (Aghnia et al., 2023). Pemanfaatan Google Drive menjadi langkah alternatif solusi yang efektif dalam mengelola arsip foto karena dapat terhubung langsung dengan Google Spreadsheet sebagai alat pencatatan daftar arsip sembari menunggu sistem resmi yang dirancang khusus untuk mengelola arsip foto elektronik. Google Spreadsheet dapat membantu untuk meningkatkan efisiensi dalam mengelola arsip (Safrina & Sofiani, 2024).

Penelitian terdahulu seperti yang dilakukan oleh Permadani dan Waluyo (2021) membahas pemanfaatan SIKD dalam pengelolaan arsip dinamis di instansi pemerintah, namun belum menyentuh aspek arsip foto elektronik. Sementara itu, Rifany et al. (2023) menyoroti penggunaan *cloud storage* dalam pengarsipan dokumen, tetapi lebih fokus pada aspek keamanan data, bukan pada konteks implementasi di lembaga pemerintahan. Dengan demikian, masih terdapat celah penelitian terkait pemanfaatan layanan berbasis *cloud computing* untuk pengelolaan arsip foto elektronik di instansi pemerintah, terutama dalam hubungannya dengan prinsip pengelolaan arsip elektronik yang mencakup autentisitas, integritas, reliabilitas, dan aksesibilitas (AIRA).

Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini penting dilakukan untuk menilai sejauh mana layanan Google Drive dan Google Spreadsheet dapat dimanfaatkan sebagai sarana penyimpanan arsip foto elektronik di Bappeda Provinsi Jawa Tengah. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjelaskan bagaimana penerapan prinsip AIRA dalam praktik pengelolaan arsip foto elektronik, sehingga menghasilkan temuan empiris yang bermanfaat baik secara teoretis dalam pengembangan ilmu kearsipan digital, maupun secara praktis dalam penyusunan kebijakan dan model pengelolaan arsip foto di instansi pemerintah. Dengan demikian, keterkaitan antara permasalahan, tujuan, dan manfaat penelitian menjadi satu kesatuan logis yang menunjukkan kontribusi ilmiah penelitian ini terhadap peningkatan tata kelola arsip di era digital.

1.2 Rumusan Masalah

Peralihan dari aplikasi SIKD ke aplikasi SRIKANDI menimbulkan kendala dalam pengelolaan arsip foto elektronik karena kedua aplikasi tersebut tidak terintegrasi untuk mengelola arsip foto. Akibatnya, sebagian arsip foto periode 1971–2014 yang sebelumnya tersimpan di SIKD tidak dapat diakses kembali. Hingga saat ini, upaya penataan baru dilakukan terhadap arsip foto periode 1971–1990, sementara arsip setelah periode tersebut belum sepenuhnya terkelola. Untuk menutupi kekosongan sistem hingga tersedianya fitur khusus pengelolaan arsip foto elektronik pada Srikandi, pengelola arsip di Bappeda Provinsi Jawa Tengah menggunakan Google Drive sebagai media penyimpanan sementara yang terintegrasi dengan Google Spreadsheet sebagai sarana pencatatan dan pendataan. Namun, kondisi arsip yang belum tertata secara sistematis berdampak pada terhambatnya proses penyerahan arsip, karena sebagian arsip belum terkelola dengan baik akibat terhapusnya data pada sistem sebelumnya. Berdasarkan kenyataan tersebut, maka permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini berkaitan dengan pemenuhan prinsip autentisitas, integritas, reliabilitas, dan aksesibilitas arsip foto elektronik. Oleh karena itu, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik pengelolaan arsip foto elektronik Bappeda Provinsi Jawa Tengah pasca peralihan dari SIKD ke SRIKANDI?
2. Bagaimana strategi yang dilakukan untuk memenuhi prinsip autentisitas, integritas, reliabilitas, dan aksesibilitas dalam penyimpanan arsip foto elektronik di Bappeda Provinsi Jawa Tengah?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini mempunyai tujuan sebagai berikut:

1. Menguraikan praktik pengelolaan arsip foto elektronik Bappeda Provinsi Jawa Tengah pasca peralihan dari SIKD ke SRIKANDI.

2. Menjelaskan strategi yang dilakukan untuk memenuhi prinsip autentisitas, integritas, reliabilitas, dan aksesibilitas arsip foto elektronik di Bappeda Provinsi Jawa Tengah.

1.4 Manfaat Penelitian

a. Manfaat Praktis

Penelitian ini berguna untuk mendukung pengelola arsip di Bappeda Provinsi Jawa Tengah dan instansi pemerintah lainnya yang menghadapi permasalahan serupa. Hal ini didasari oleh alasan sebagai berikut:

1. Memberikan rekomendasi kepada Bappeda Provinsi Jawa Tengah dalam penyusunan prosedur operasional standar (SOP) pengelolaan arsip foto elektronik berbasis layanan cloud, agar lebih aman, efisien, dan mudah diakses.
2. Menjadi masukan bagi Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) dalam mengembangkan kebijakan kearsipan nasional, khususnya terkait fitur arsip foto elektronik pada aplikasi SRIKANDI.
3. Menjadi referensi bagi instansi pemerintah lainnya yang belum memiliki sistem kearsipan foto elektronik, sehingga dapat menerapkan model pengelolaan sementara yang efektif menggunakan layanan Google.

b. Manfaat Teoritis

1. Penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi untuk pengembangan ilmu kearsipan, terutama mengenai integrasi prinsip AIRA dalam pengelolaan arsip foto elektronik berbasis *cloud computing*.
2. Menjadi bahan kajian akademik yang memperkuat konsep manajemen arsip elektronik (Electronic Records Management System) dalam konteks pemerintahan daerah di Indonesia.

3. Menjadi dasar teoretis bagi penelitian lanjutan yang mengkaji keamanan, keandalan, dan efisiensi penggunaan *cloud service* dalam sistem kearsipan pemerintah.

1.5 Luaran

Luaran dari penelitian ini berupa Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dalam bentuk Modul berjudul “*Penataan Arsip Foto Sistematis*”. Modul ini disusun berdasarkan hasil penelitian mengenai pemanfaatan layanan Google sebagai sarana penyimpanan arsip foto elektronik, sehingga dapat digunakan sebagai pedoman bagi pihak-pihak yang terlibat dalam pengelolaan arsip foto.